

## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat)**

**Nanang Kurniawan, Sindy Wahyuni, Novy Lestari, Teguh Ferdita I, Miftahul Farid**  
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional  
Email: [asep.budiawan@iwu.ac.id](mailto:asep.budiawan@iwu.ac.id)<sup>1</sup>, [alma.almaida2807@gmail.com](mailto:alma.almaida2807@gmail.com)<sup>2</sup>, [sisri@gmail.com](mailto:sisri@gmail.com)<sup>3</sup>, [aiyuni@gmail.com](mailto:aiyuni@gmail.com)<sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi warga terhadap partisipasi perempuan dalam ranah politik di Kecamatan Sindangkerta, serta bagaimana faktor – faktor yang ada mempengaruhi pandangan tersebut. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan demokrasi yang inklusif. Namun, masih banyak hambatan untuk keterlibatan perempuan dalam politik, baik secara struktural maupun kultural. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap warga dari berbagai latar belakang sosial,

Penelitian ini menganalisis tingkat penerimaan, dukungan, serta stereotip yang melekat pada perempuan yang terjun ke dalam dunia politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi warga sangat di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman politik, serta isu – isu kesetaraan gender. Mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap partisipasi perempuan dalam politik, namun masih ditemukan pandangan yang meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

**Kata kunci :** persepsi warga, partisipasi politik, perempuan, kesetaraan gender, kepemimpinan

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe citizens' perceptions of women's participation in politics, and how existing factors influence these views. Women's participation in politics is an important indicator in realizing gender equality and inclusive democracy. However, there are still many barriers to women's involvement in politics, both structurally and culturally. Using a quantitative approach through a survey of citizens from various social backgrounds, this study analyzes the level of acceptance, support, and stereotypes attached to women who enter the world of politics. The results of the study show that citizens' perceptions are greatly influenced by their level of education, political experience, and gender equality issues. The majority of respondents showed a positive attitude towards women's participation in politics, but there were still views that doubted women's capacity as leaders. These findings are expected to be the basis for formulating strategies to increase women's participation in politics in Indonesia.*

**Keywords:** *citizens' perceptions, political participation, women, gender equality, leadership*

## PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan kesetaraan gender di suatu negara. Meskipun secara konstitusional perempuan memiliki hak yang sama untuk berpolitik, kenyataannya representasi perempuan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari data keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, di mana jumlah perempuan di DPR hanya sekitar 12% dan bahkan sempat menurun menjadi 9,2% pada Pemilu 1999. Setelah itu, terjadi peningkatan bertahan 11,8% pada Pemilu 2004 dan 18% pada Pemilu 2009. Meskipun menunjukkan trend peningkatan, data ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan masih jauh dari proporsi laki – laki yang mendominasi parlemen..

Di tingkat lokal, ketimpangan ini semakin terlihat. Misalnya, dalam Pemilu 2019, hanya 17% kepala daerah perempuan yang terpilih di Indonesia (KPU, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi politik perempuan. Di banyak daerah, termasuk di Kecamatan Sindangkerta, partisipasi perempuan dalam politik masih dipandang secara skeptis oleh masyarakat, beberapa gejala yang terlihat antara lain adalah minimnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, kebanyakan perempuan hanya mengisi posisi sebagai staff atau bagian administrasi pada instansi pemerintah. Adanya stereotip gender yang menyatakan bahwa ranah politik dikhususkan hanya untuk laki – laki, sedangkan perempuan lebih cocok di ranah domestic.

Penelitian ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Pangaribuan dan Ivanna (2024) mengenai "**Persepsi Masyarakat terhadap Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kelurahan Siderejo, Medan Tembung**", yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap legislator perempuan bersifat beragam. Sebagian masyarakat memandang positif keterlibatan perempuan dalam politik, terutama karena advokasi mereka terhadap hak-hak perempuan dan isu-isu sosial. Namun, terdapat pula kelompok yang masih menunjukkan sikap skeptis, mengaitkannya dengan perbedaan gender dan kurangnya dukungan struktural. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai representasi gender dalam politik, peran media dalam membentuk opini publik, serta perlunya kebijakan dan dukungan kelembagaan yang mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik. Hal ini memperkuat validitas dan relevansi penelitian ini dalam menelaah dinamika persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan.

Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Karya dan Pandini (2021) dalam studi berjudul "**Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean**", yang menunjukkan bahwa masih terdapat skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap kemampuan calon legislatif perempuan, sehingga menyebabkan kurangnya dukungan elektoral. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa minimnya upaya sosialisasi dari kandidat perempuan turut berkontribusi pada rendahnya pengakuan mereka di kalangan pemilih. Selain itu, studi ini mengidentifikasi adanya hambatan budaya, sosial, ekonomi, dan politik sebagai faktor signifikan yang

menghalangi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Budaya patriarki yang masih kuat juga disebut sebagai penghalang utama, karena sering kali mengesampingkan legislator perempuan dan menyulitkan mereka dalam menjalankan tugas secara optimal. Temuan ini memberikan landasan empirik yang relevan bagi penelitian ini dalam memahami dinamika persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Selain itu, penelitian yang berjudul "**Gender dan Partisipasi Politik: Studi Kasus Minimnya Partisipasi Perempuan di Aceh**" yang dilakukan oleh Lutfi et al. pada tahun 2024, menyoroti bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Aceh secara signifikan terhambat oleh budaya patriarki yang dominan, yang membentuk persepsi masyarakat tentang peran politik perempuan. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan kompleks seperti akses terbatas ke pendidikan, sumber daya, dan dukungan sosial, di samping norma-norma budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Selain itu, studi ini menekankan perlunya implikasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi keterlibatan politik perempuan, menunjukkan bahwa kuota gender dan peningkatan akses ke pendidikan serta perawatan kesehatan dapat meningkatkan partisipasi perempuan. Meskipun kerangka hukum mendukung perwakilan perempuan, partisipasi aktual tetap rendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik.

## LANDASAN TEORI

Teori Persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan individu menangkap, memahami, dan menginterpretasikan stimulus dari lingkungan sekitar (Suryabrata, 2002). Dalam konteks penelitian ini, persepsi warga terhadap partisipasi perempuan dalam politik dibentuk melalui pengalaman, pengetahuan, nilai budaya, dan pengaruh sosial. Menurut Slameto (2010), persepsi dipengaruhi oleh faktor internal, seperti perhatian, motivasi, dan emosi, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya. Dengan demikian, persepsi warga terhadap keterlibatan perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Huntington & Nelson, 1976). Verba dan Nie (1972) mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi partisipasi konvensional, seperti memilih dalam pemilu dan bergabung dalam partai politik; serta partisipasi non-konvensional, seperti demonstrasi dan boikot. Dalam konteks perempuan, partisipasi politik mencerminkan keterlibatan aktif dalam institusi politik formal maupun informal. Namun, perempuan seringkali menghadapi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi peran serta mereka secara maksimal.

Teori Gender dan Politik menyoroti ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam sistem politik. Pendekatan feminis dalam ilmu politik mengkritik dominasi maskulinitas dalam institusi-institusi politik serta menekankan pentingnya inklusi gender dalam proses demokrasi.

Mansbridge (1999) menegaskan bahwa partisipasi perempuan diperlukan untuk menjamin representasi yang adil secara deskriptif maupun substantif. Sapiro (1981) berargumen bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh stereotip gender, keterbatasan akses pendidikan politik, dan minimnya dukungan dari partai politik terhadap kader perempuan.

Teori Representasi Politik, Pitkin (1967) membedakan empat bentuk representasi, yaitu representasi formal (otoritas legal), deskriptif (kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili), simbolik (keberterimaan simbolis), dan substantif (memperjuangkan kepentingan konstituen). Dalam konteks perempuan, keberadaan wakil perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya mencerminkan representasi simbolik atau deskriptif, tetapi juga diharapkan mampu memperjuangkan isu-isu strategis seperti kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuant dengan metode survei untuk mengetahui persepsi warga terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Kecamatan Sindangkereta yang berusia di atas 17 tahun serta telah memiliki hak pilih. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan variasi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Data dikumpulkan melalui \*kuesioner terbuka\* yang di distribusikan dengan menggunakan Google Form. Formulir ini berisi pertanyaan terbuka dan tertutup yang dirancang secara semi-terstruktur untuk memperoleh jawaban mendalam sesuai pengalaman serta pandangan responden (Kuesioner Penelitian: Persepsi Warga terhadap Partisipasi Perempuan dalam Politik)

## **PEMBAHASAN**

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui 2 kriteria yaitu, warga yang berdomisili di Kecamatan Sindangkereta dan berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih. Pada penelitian ini 50 orang bersedia menjadi responden, yang terdiri dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Mayoritas responden adalah perempuan ( $\pm 80\%$ ) dengan rentang usia 17–45 tahun, dan sebagian besar memiliki pendidikan terakhir pada Tingkat SMA/Sederajat. Hal ini memberikan gambaran bahwa partisipasi dalam survei didominasi oleh perempuan usia produktif, yang relevan untuk mengeksplorasi persepsi tentang peran Perempuan dalam politik

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam hal memimpin dan berpolitik. Namun, masih terdapat sebagian responden (terutama laki-laki atau dengan pendidikan rendah) yang menilai bahwa kemampuan perempuan kurang dibandingkan laki-laki.

Faktor yang melatarbelakangi keraguan ini umumnya berkaitan dengan norma budaya, ajaran agama, dan stereotip gender. Pandangan seperti "*perempuan terlalu emosional*" atau "*politik bukan ranah perempuan*" masih ditemukan dalam beberapa respon.

*"Perempuan terlalu emosional untuk jadi pemimpin."* – Responden laki-laki, buruh, usia 46+  
*"Kalau menurut agama, sebaiknya laki-laki yang di depan."* – Responden, usia 17-25

Secara umum, responden menyatakan setuju jika perempuan menjadi anggota DPR, kepala desa, atau kepala daerah. Hal ini menunjukkan adanya dukungan normatif terhadap keterlibatan perempuan dalam struktur politik formal.

Namun demikian, beberapa responden tetap menyampaikan keberatan yang sifatnya simbolik atau berdasarkan nilai-nilai tertentu, menunjukkan bahwa dukungan belum sepenuhnya transformatif dan masih bercampur dengan norma tradisional.

Beberapa faktor utama yang disebutkan responden sebagai alasan keraguan masyarakat terhadap perempuan yang ingin masuk ke dunia politik, antara lain:

- Budaya patriarki dan ajaran sosial yang membatasi peran perempuan.
- Stereotip negatif seperti perempuan dianggap terlalu emosional.
- Minimnya pengalaman Perempuan dalam bidang politik.
- Pandangan bahwa tugas utama perempuan adalah di ranah domestik

Temuan ini menguatkan teori Siregar (2021) bahwa budaya patriarki di masyarakat lokal masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik.

Berbagai saran muncul dari responden terkait cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, antara lain:

- Pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas perempuan.
- Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.
- Penghapusan stereotip negatif melalui media dan pendidikan.
- Kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk memperkuat keterwakilan perempuan.

*"Harapan saya, perempuan jangan dianggap remeh. Politik butuh suara perempuan."* – Responden, pelajar perempuan, usia 17–25

*"Harus ada pelatihan dan dukungan keluarga agar perempuan bisa tampil."* – Responden, ibu rumah tangga, usia 36–45

sebagian besar responden berharap agar:

- Perempuan memiliki peran lebih besar dan aktif dalam politik.
- Muncul kebijakan yang lebih inklusif terhadap isu perempuan.
- Masyarakat semakin menerima perempuan sebagai pemimpin.

Responden juga menginginkan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi pengambil keputusan utama di berbagai tingkatan pemerintahan.

“Semoga perempuan membawa politik yang lebih manusiawi dan adil” Responden, perempuan, perangkat desa

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi warga Kecamatan Sindangkerta terhadap partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, pengalaman politik, dan norma budaya. Meskipun mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, masih terdapat keraguan yang muncul, terutama dari kalangan laki-laki dan individu dengan pendidikan rendah. Stereotip gender dan budaya patriarki menjadi hambatan utama yang menghalangi partisipasi aktif perempuan dalam ranah politik. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlunya dukungan struktural untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik.

Diperlukan program pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka dalam berpolitik. Selain itu, masyarakat, terutama keluarga, perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik, agar mereka merasa didukung dalam mengambil peran aktif. Upaya untuk menghapus stereotip negatif tentang perempuan dalam politik juga harus dilakukan melalui media dan pendidikan, guna membentuk pandangan yang lebih positif dan inklusif. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan afirmatif yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik, seperti kuota gender, untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik harus dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat dan mendorong penerimaan terhadap perempuan sebagai pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Mansbridge, J. (1999). Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes'. *The Journal of Politics*, 61(3), 628–657.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Sapiro, V. (1981). When Are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women. *The American Political Science Review*, 75(3), 701–716.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Rajawali Pers.

- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). \*Participation in America: Political Democracy and Social Equality\*. Harper and Row.
- Ballington, J., & Karam, A. (2005). Women in Parliament: Beyond Numbers. International IDEA.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019). Rekapitulasi Hasil Pemilu Anggota DPR RI 2019.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2001). Cultural Obstacles to Equal Representation. *Journal of Democracy*, 12(3), 126-140
- Paxton, P., & Hughes, M. M. (2016). Women, Politics, and Power: A Global Perspective.
- Prihatini, E. (2019). "Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position". *Asian Politics & Policy*
- Bari, A. (2020). "Gender Stereotypes in Pakistani Politics". *Journal of International Women's Studies*.
- Karya, B., & Pandini, P. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KECAMATAN PARENGGEAN. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 3(2), 118-127.  
<https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.46>
- Pangaribuan, M., & Ivanna, J. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 806-810.